

HASIL KARYA

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-------|---|--|--|
| 1994 | Penelitian: Aspek Hukum Pemindahan Hak Atas Satuan Rumah Susun/Apartemen Dengan Sistem Kondominium (Studi Kasus Pada Apartemen Di Jakarta dan Surabaya). | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 1995 | Penelitian: Penguasaan dan Penggunaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah Di Perkotaan. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 1996 | Penelitian: Pengurusan Hak Atas Tanah Bangunan Bertingkat. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Badan Pertanahan Nasional. |

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| 2002 | Kajian Kebijakan Pertanahan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Provinsi DKI Jakarta. | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. |
| 2004 | Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Provinsi DKI Jakarta. | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. |
| 2004 | Penelitian: Penggunaan Lembaga <i>Rechtsverwerking</i> Dalam Mengatasi Kelemahan Sistem Negatif Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2004 | Penelitian: Kajian Yuridis Pemberian Imbalan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di DKI Jakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2005 - 2007 | Pelatihan di Bidang Pertanahan bagi Pegawai Departemen Dalam Negeri. | Departemen Dalam Negeri. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. |
| 2006 | Penelitian: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Hukum Pertanahan. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2006 | Penelitian: Fungsi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pertanahan Dalam Mendukung Perencanaan Peruntukkan dan Penggunaan Tanah. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2011 | Penelitian: Implementasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-------|--|---|---|
| 2012 | Memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Terkait RUU Pertanahan. | -- | Pusat Studi Hukum Agraria dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2012 | Focus Group Discussion: Penyempurnaan Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah. | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. |
| 2013 | Kajian Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah. | PT Jakarta Propertindo | Pusat Studi Hukum Agraria dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. |
| 2014 | Background Paper dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. | Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Konsultan Hukum AHP. |
| 2015 | Rapat Kerja Dosen Pengampu Mata Kuliah Kelompok Hukum Agraria (bidang-bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas unsur-unsur sumber daya alam), dan pembuatan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2015 | Nara Sumber: Pembahasan Kepemilikan Properti Oleh Warga Negara Asing. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2015 | Nara Sumber: Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Rapat | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan |

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-------|---|--|--|
| | Koordinasi Teknis Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015 Wilayah Sumatera di Kota Batam). | Rakyat Republik Indonesia. | Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2015 | Penyusunan Himpunan Peraturan Di Bidang Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Real Estate. | PT Sinar Mas Land. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Konsultan Hukum AHP. |
| 2016 | Pertemuan Ilmiah Dosen-Dosen Pengampu mata kuliah Kelompok Hukum Agraria se-Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kelompok Dosen Hukum Agraria Indonesia. |
| 2016 | Nara Sumber: Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Perijinan Rumah Susun Umum Dan Komersial. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2016 | Nara Sumber: Penyusunan Materi Teknis Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pencadangan Tanah Untuk Perumahan dan Rumah Susun. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2017 | Seminar Nasional dan call paper: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. |
| 2017 | Nara Sumber: Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan |

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-------------|--|---|---|
| | Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Susun Milik. | | Rakyat Republik Indonesia. |
| 2017 | Nara Sumber: Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni, dan Pelaku Pembangunan Rumah Susun Milik. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2018 | Diskusi Ilmiah “Informasi Terkini Rancangan Undang-Undang Pertanahan”. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2017 – 2018 | Kajian Hukum Mengenai Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 26/Prt/M/2015 dan No 28/Prt/M/2015 Atas Rencana Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Dan Tanah Endapan Di Sisi Barat Sungai Cisdane Di Lokasi PT Bumi Serpong Damai, Tbk. | PT Sinar Mas Land. | Pusat Studi Hukum Agraria, PT Sinar Mas Land, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2019 | Rapat Kerja dan Up Grading Dosen-Dosen Mata Kuliah Kelompok Hukum Agraria Se Indonesia. | Kementerian Agraria dan Pusat Studi Hukum Agraria. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. |
| 2020 | Workshop “Pembaharuan Mata Kuliah Kelompok Hukum Agraria (Hukum Agraria, Pendaftaran Tanah, Reforma Agraria, Yurisprudensi Dan Doktrin Hukum, Hukum Air Dan Perikanan, Hukum Kondominium, Hukum Kehutanan, Hukum Pertambangan)”. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-----------|--|--|--|
| 2021 | Webinar “Catatan Kritis Untuk Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Agraria Yang Dapat Menimbulkan Konflik Agraria”. | Pusat Studi Hukum Agraria. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. |
| 2021-2022 | Penelitian: Inventarisasi Kepemilikan Tanah Oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kawasan Kota Intan Jakarta Barat | Universitas Trisakti | PT Kereta Api Indonesia |
| 2022 | Penelitian: Formulasi Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2023 | Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pencegahan Kasus Pertanahan | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |

PUBLIKASI

- Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.
- Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah
- Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional
- Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah
- Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi
- Kondominium dan Permasalahannya
- The Principles of Indonesia Agrarian Law
- Hukum Pertanahan di Belanda dan di Indonesia
- Seputar Hak Pengelolaan
- Prosiding Seminar Nasional Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
- Dinamika Pemikiran Tentang Perkembangan Hukum Tanah Nasional

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-------------|--|----------------------------------|--|
| 2002 | Kajian Kebijakan Pertanahan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Provinsi DKI Jakarta. | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. |
| 2004 | Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Provinsi DKI Jakarta. | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. |
| 2004 | Penelitian: Penggunaan Lembaga <i>Rechtsverwerking</i> Dalam Mengatasi Kelemahan Sistem Negatif Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2004 | Penelitian: Kajian Yuridis Pemberian Imbalan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di DKI Jakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2005 - 2007 | Pelatihan di Bidang Pertanahan bagi Pegawai Departemen Dalam Negeri. | Departemen Dalam Negeri. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. |
| 2006 | Penelitian: Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Hukum Pertanahan. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2006 | Penelitian: Fungsi Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pertanahan Dalam Mendukung Perencanaan Peruntukkan dan Penggunaan Tanah. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2011 | Penelitian: Implementasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah DKI Jakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-------|--|---|---|
| 2012 | Memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Terkait RUU Pertanahan. | -- | Pusat Studi Hukum Agraria dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2012 | Focus Group Discussion: Penyempurnaan Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah. | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. |
| 2013 | Kajian Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah. | PT Jakarta Propertindo | Pusat Studi Hukum Agraria dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. |
| 2014 | Background Paper dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. | Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Konsultan Hukum AHP. |
| 2015 | Rapat Kerja Dosen Pengampu Mata Kuliah Kelompok Hukum Agraria (bidang-bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas unsur-unsur sumber daya alam), dan pembuatan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS). | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2015 | Nara Sumber: Pembahasan Kepemilikan Properti Oleh Warga Negara Asing. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2015 | Nara Sumber: Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Rapat | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan |

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-------|---|--|--|
| | Koordinasi Teknis Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015 Wilayah Sumatera di Kota Batam). | Rakyat Republik Indonesia. | Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2015 | Penyusunan Himpunan Peraturan Di Bidang Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Real Estate. | PT Sinar Mas Land. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Konsultan Hukum AHP. |
| 2016 | Pertemuan Ilmiah Dosen-Dosen Pengampu mata kuliah Kelompok Hukum Agraria se-Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kelompok Dosen Hukum Agraria Indonesia. |
| 2016 | Nara Sumber: Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Perijinan Rumah Susun Umum Dan Komersial. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2016 | Nara Sumber: Penyusunan Materi Teknis Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pencadangan Tanah Untuk Perumahan dan Rumah Susun. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2017 | Seminar Nasional dan call paper: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. |
| 2017 | Nara Sumber: Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan |

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-------------|--|---|---|
| | Sarana, dan Utilitas Umum Rumah Susun Milik. | | Rakyat Republik Indonesia. |
| 2017 | Nara Sumber: Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tentang Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni, dan Pelaku Pembangunan Rumah Susun Milik. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2018 | Diskusi Ilmiah “Informasi Terkini Rancangan Undang-Undang Pertanahan”. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |
| 2017 – 2018 | Kajian Hukum Mengenai Penggunaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 26/Prt/M/2015 dan No 28/Prt/M/2015 Atas Rencana Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Dan Tanah Endapan Di Sisi Barat Sungai Cisdane Di Lokasi PT Bumi Serpong Damai, Tbk. | PT Sinar Mas Land. | Pusat Studi Hukum Agraria, PT Sinar Mas Land, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. |
| 2019 | Rapat Kerja dan Up Grading Dosen-Dosen Mata Kuliah Kelompok Hukum Agraria Se Indonesia. | Kementerian Agraria dan Pusat Studi Hukum Agraria. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. |
| 2020 | Workshop “Pembaharuan Mata Kuliah Kelompok Hukum Agraria (Hukum Agraria, Pendaftaran Tanah, Reforma Agraria, Yurisprudensi Dan Doktrin Hukum, Hukum Air Dan Perikanan, Hukum Kondominium, Hukum Kehutanan, Hukum Pertambangan)”. | Pusat Studi Hukum Agraria. | -- |

| Tahun | Judul Kegiatan | Pemberi Dana | Mitra |
|-----------|--|--|--|
| 2021 | Webinar “Catatan Kritis Untuk Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Agraria Yang Dapat Menimbulkan Konflik Agraria”. | Pusat Studi Hukum Agraria. | Pusat Studi Hukum Agraria dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. |
| 2021-2022 | Penelitian: Inventarisasi Kepemilikan Tanah Oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kawasan Kota Intan Jakarta Barat | Universitas Trisakti | PT Kereta Api Indonesia |
| 2022 | Penelitian: Formulasi Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| 2023 | Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pencegahan Kasus Pertanahan | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |